



## **BUPATI ROKAN HULU**

---

### **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 4 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **BUPATI ROKAN HULU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
  3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 ) ;
  7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

REVISI PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI ROKAN HULU,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008.

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lampiran Negara Tahun 1985 Nomor 08, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lampiran Negara Tahun 1994 Nomor 02, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3669);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lampiran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3688);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kamium, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kutai, Singingi, dan Kota Batam (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3902);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3952);
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4048);

9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274) ;
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Bupati Rokan Hulu;

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kutai Singingi, dan Kota Batam (Lampiran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4374);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lampiran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pusat dan Daerah (Lampiran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dalam Pembentukan (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lampiran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pijajaran Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penggunaan Keuangan Kepala Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lampiran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lampiran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Penggunaan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/14/1996 Tahun 2006 tentang Pengesahan dan Pembentukan Bupati Rokan Hilir;

**Pasal 2**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor PERBUP. 903 / keu / APBD/ 6 /2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 20 April 2006

**BUPATI ROKAN HULU,**

dto

**Drs. H. ACHMAD. MSi**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal, 21 April 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**MUZAWIR. LS., SH**

Pembina Tk. NIP. 730004479

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2006**